



Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penggunaan Produk dan Jasa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional

Aan Nasrullah

Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul 'Ula (STAIM) Nganjuk

Email: aan.aljalil@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari kajian ini adalah mengkaji upaya-upaya dari *stakeholder* lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan produk dan jasa lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), dan bagian faktor pendukung kestabilan sistem keuangan nasional. Mayoritas penduduk muslim dan mayoritas masih berpenghasilan rendah, tentu merupakan potensi yang besar bagi LKMS, karena akses ke perbankan hanya bagi mereka yang memenuhi persyaratan. Selain itu kesadaran masyarakat akan kepatuhan syariah semakin meningkat. Namun data menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penggunaan produk dan jasa LKMS masih sangat minim. Oleh karena itu sudah menjadi tugas bagi *stakeholder* keuangan syariah untuk berupaya secara bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan produk dan jasa LKMS. Dengan strategi kemitraan secara horizontal dan vertikal antar *stakeholder* LKMS, yakni Pemerintah dan Otoritas, Praktisi LKMS, Perguruan Tinggi serta Masyarakat pada umumnya. Yang pada akhirnya akan mendukung stabilitas sistem keuangan nasional, mengingat bahwa lembaga keuangan syariah sudah teruji dan tahan dari krisis.

Kata Kunci: LKMS, Partisipasi masyarakat, produk dan jasa LKMS, Kestabilan Sistem Keuangan.

Pendahuluan

Secara umum kelahiran kembali dan perkembangan sistem keuangan syariah di mulai awal abad ke-20, hal ini terlihat dari munculnya lembaga keuangan syariah diberbagai negara muslim. Praktik dan implementasi prinsip syariah di lembaga keuangan baik bank maupun non bank merupakan respon dari meningkatnya permintaan jasa pelayanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pemahaman masyarakat akan sistem keuangan syariah yang semakin mendalam, memunculkan diskursus tentang aplikasi keuangan syariah, yang dianggap sebagai alternatif keluar dari "hegemoni kolonial" ekonomi. dan pada dampak selanjutnya adalah semakin bervariasi dan beragam aplikasi sistem keuangan syariah, baik jenis lembaga yang tersedia, produk dan akad maupun penggunaannya.



Perkembangan keuangan syariah global serta dorongan dari kesadaran masyarakat Indonesia akan penerapan prinsip-prinsip sistem ekonomi syariah secara umum, menjadikan pasar keuangan syariah domestik turut mengalami perkembangan, sebagaimana yang telah dialami oleh dunia internasional sebelumnya, meski secara kuantitas Indonesia adalah penduduk dengan jumlah muslim terbanyak, namun dalam penerapan sistem ekonomi syariah khususnya dalam sistem keuangan, Indonesia tertinggal oleh negara-negara muslim lain, seperti Mesir, Malaysia, Dubai, Sudan, Qatar bahkan Filipina tahun 1973 sudah mendirikan lembaga keuangan bank “Amanah Bank Filipina”.

Namun meski begitu, sejak berdirinya bank umum syariah pertama di Indonesia pada tahun 1992, yakni Bank Muamalat yang diprakarsai oleh MUI (Majlis Ulama Indonesia), telah mampu menjadi *tonggak* perkembangan aplikasi ekonomi dan keuangan syariah secara luas, khususnya sistem keuangan nasional, terbukti dalam aplikasi keuangan syariah Indonesia sudah mulai mengejar ketertinggalannya dari negara-negara lain. Selain perbankan, sistem keuangan syariah di Indonesia juga meliputi pasar modal, reksa dana, asuransi, koperasi, BMT, dan lembaga keuangan mikro lainnya¹, dan seiring berjalannya waktu pemerintah sudah mulai memperhatikan keberadaan sistem keuangan syariah nasional dengan memberikan infrastruktur lunak (UU dan Peraturan) guna untuk memperlancar kegiatan keuangan syariah.

Perkembangan keuangan domestik juga menjadi fokus kebijakan mengingat struktur pasar keuangan yang sehat akan memberikan dampak positif terhadap efektivitas transmisi kebijakan moneter baik melalui jalur perbankan maupun jalur keuangan². Sehingga dapat dikatakan bahwa tantangan sistem keuangan nasional akan menghadapi tantangan yang berat dan kompleks, karena sejak tahun 1992 Indonesia secara resmi telah menggunakan *dual banking system*, di mana lembaga keuangan boleh menggunakan sistem konvensional atau sistem syariah. Sehingga otoritas moneter perlu hati-hati dalam menentukan kebijakan dan regulasi, agar kedua sistem yang saling bertentangan ini dapat diakomodir dan mampu mencapai tujuan moneter secara umum.

Perkembangan bank syariah yang pesat baru terasa semenjak Pemerintah dan Bank Indonesia memberikan komitmen besar dan menempuh berbagai kebijakan untuk mengembangkan bank syariah dengan serius, khususnya sejak perubahan UU perbankan dengan UU No. 10 tahun 1998. Berbagai kebijakan tersebut tidak hanya menyangkut perluasan jumlah kantor dan operasi bank-bank syariah untuk meningkatkan sisi penawaran, tetapi juga pengembangan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan sisi permintaan. Perkembangan yang pesat terutama tercatat sejak dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yang memberi izin kepada bank konvensional untuk mendirikan suatu unit usaha syariah (UUS). Semenjak itu

¹ Darsono dkk. *Dinamika produk dan akad keuangan syariah di Indonesia*. Jakarta: Departemen Riset Kebanksentralan Bank Indonesia. Hal, 20. 2016.

²



kantor dan operasi bank syariah tumbuh dimana-mana seperti jamur di musim hujan³. Dari perkembangan perbankan syariah memberikan efek multiplier kepada sektor keuangan yang lain.

**Gambar 1.1 Perkembangan
Industri Perbankan**

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014						2015					
						Jun ^a	Jul ^a	Agus ^a	Sep ^a	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
Bank Umum Syariah																	
- Jumlah Bank	6	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
- Jumlah Kantor	711	1.215	1.401	1.745	1.998	2.149	2.175	2.174	2.174	2.157	2.147	2.151	2.145	2.144	2.138	2.135	2.121
Unit Usaha Syariah																	
- Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	25	23	24	24	23	23	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
- Jumlah Kantor	287	262	336	517	590	426	417	403	397	362	354	320	322	324	325	323	327
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah																	
- Jumlah Bank	138	150	155	158	163	163	163	163	163	163	163	163	164	162	162	162	161
- Jumlah Kantor	225	286	364	401	402	429	424	436	433	431	438	439	477	486	471	433	440
Total Kantor	1.223	1.763	2.101	2.663	2.990	3.004	3.016	3.013	3.004	2.950	2.939	2.910	2.944	2.954	2.934	2.891	2.888

^a Angka-angka diperbaiki
^b Angka-angka sementara

Sumber: BI 2015

Gambar 1.1 menunjukkan pertumbuhan perbankan syariah, mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, bila kita cermati lebih jauh lagi, maka tidak hanya jumlah bank dan kantor saja yang mengalami pertumbuhan, namun juga asset serta aspek-aspek lain dalam perbankan juga mengalami hal yang sama. Hal ini sejalan dengan *demand* terhadap layanan perbankan syariah, di mana masyarakat Indonesia pada umumnya sudah mulai sadar dan membutuhkan perbankan yang sesuai dengan ideologinya, artinya penggunaan jasa dan produk bank tidak lagi mengutamakan kebutuhan namun juga lebih pada pemenuhan akan kewajiban dalam bermuamalah.

Namun mengingat jangkauan perbankan umum syariah yang terbatas, atau tidak mampu menjangkau pada kalangan yang tidak dapat memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan bank umum syariah, LKMS hadir untuk membantu Perbankan dalam memberikan pembiayaan ke pelaku usaha, guna mengerakkan sektor riil. Dalam perkembangannya, lembaga-lembaga keuangan informal ini lebih di kenal di kalangan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), karena sifatnya yang lebih fleksibel, misalnya dalam hal persyaratan dan jumlah pinjaman yang tidak seketat persyaratan perbankan maupun keluwesan pada pencairan kredit. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa keberadaan lembaga-lembaga keuangan informal sesuai

³ Ascarya dan Yumanita, D. *Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil di Perbankan Syariah Indonesia*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Juni 2005.



dengan kebutuhan dengan kebutuhan pelaku UKM, yang umumnya membutuhkan pembiayaan sesuai skala dan sifat usaha kecil⁴.

Selain karena adanya permintaan terhadap layanan lembaga keuangan mikro, perkembangan dari perbankan syariah telah mendorong perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang ditandai dengan menjamurnya lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) seperti *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), Koperasi Syariah, Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) dan lain sebagainya. Pada dasarnya LKMS juga memiliki andil terhadap kestabilan dan kelancaran sistem keuangan nasional, melihat bahwa LKMS adalah bagian dari sistem keuangan nasional, selain itu ada hubungan timbal balik antara sektor keuangan dan sektor riil. Di mana kegiatan ekonomi dan lembaga keuangan merupakan dua variabel yang mempunyai hubungan imbal balik, meningkatnya resiko kredit yang berujung pada meningkatnya potensi tekanan terhadap stabilitas sistem keuangan dan akhirnya berdampak pada lesunya kegiatan ekonomi. Kelesuan kegiatan ekonomi tercermin dari lambatnya pertumbuhan ekonomi, atau yang sering disebut dengan moderasi ekonomi.

Moderasi ekonomi juga menyebabkan perlambatan kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pada tahun 2014, kredit UMKM mencapai Rp731,8 triliun atau tumbuh melambat sebesar 15,1% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 15,5%. Perlambatan ekonomi domestik berdampak pada daya beli masyarakat yang menurun sehingga permintaan barang dan jasa menjadi berkurang. Perlambatan pertumbuhan kredit UMKM terutama pada Sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang tumbuh 12,3% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 29,4%.⁵ Oleh karena itu keberadaan LKMS seharusnya juga mendapat perhatian khusus dari pemerintah, sebagaimana LKM (Lembaga Keuangan Mikro) konvensional yang pada tanggal 8 Januari 2013 telah diterbitkan UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang **Lembaga Keuangan Mikro (LKM)**, UU tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas pendanaan kepada UMKM, sehingga UMKM mampu membantu peningkatan produktivitas masyarakat serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Memang harus diakui bahwa sampai hari ini partisipasi masyarakat terhadap penggunaan jasa dan produk LKMS masih minim, masyarakat Indonesia pada umumnya masih *underestimated* terhadap perbankan syariah dan berimbas pada lembaga keuangan lainnya, termasuk LKMS. Sehingga masyarakat muslim pun pada umumnya masih cenderung menggunakan produk dan jasa LKM konvensional, seperti koperasi konvensional meski dengan tingkat bunga yang tinggi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Muliaman Haddad sebagai berikut:

"Only around 22% of Indonesians are connected to formal financial institutions. The inclusiveness of our financial sector needs to be improved... This is an

⁴ Wijon, Wiloejo Wirjo. *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkret Memutus Mata Rantai Kemiskinan*. Jakarta: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan, Edisi Khusus. Desember 2005. Hal, 2

⁵ Bank Indonesia. *Memperkokoh Stabilitas, Mempercepat Reformasi Struktural untuk Memperkuat Fundamental Ekonomi*. Laporan Perekonomian Indonesia 2014. Hal. 119



important target for us; creating a sound and strong financial sector that is easily accessible. Accessible for people in remote areas and on small islands, not just people in the cities. This is why micro-finance, like micro-banking and micro-insurance, is becoming so important; so we can create access."

Disisi lain terdapat dua potensi utama dalam perkembangan keuangan syariah, *Pertama*, masyarakat kita adalah mayoritas muslim dan pelaku usaha kecil, tidak menutup kemungkinan permintaan LKMS akan semakin meningkat sebagaimana permintaan akan layanan produk dan jasa Perbankan syariah. *Kedua*, saat ini, aktivitas bisnis dan keuangan syariah tumbuh pesat, aktivitas tersebut meliputi industri jasa keuangan syariah, produk makanan, obat-obatan dan kosmetik halal, pariwisata syariah dan *Islamic Fashion*. Seluruh sektor usaha tersebut saling terkait dan memiliki potensi besar meningkatkan pendapatan dan keajahteraan masyarakat. Dengan potensi yang masih sangat besar, industri ini perlu dukungan untuk tumbuh lebih cepat dan berkontribusi lebih besar bagi pembangunan nasional⁶. LKMS sebagai salah satu lembaga keuangan ekonomi Islam tentu memiliki peran terhadap perkembangan dan stabilitas sistem keuangan nasional, peran tersebut dapat terpenuhi ketika tingkat partisipasi masyarakat dalam penggunaan produk dan jasa LKMS sudah tinggi.

Terlepas dari perdebatan akan tidak syar'inya LKMS dalam praktik, fenomena rendahnya partisipasi masyarakat terhadap penggunaan produk dan jasa LKMS merupakan permasalahan penting yang perlu di bahas. Berbagai permasalahan dan solusi yang tepat perlu dicari untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penggunaan produk dan jasa LKMS. Sehingga masyarakat dapat menggunakan produk dan jasa LKMS, dengan begitu LKMS dapat berperan dan berfungsi sebagaimana mestinya, yang salah satunya adalah sebagai basis yang memperkuat sistem keuangan nasional. Implikasinya adalah terbentuknya persepsi publik bahwa lembaga keuangan syariah hampir tidak ada bedanya dengan lembaga keuangan konvensional akan hilang dengan sendirinya. Oleh karena itu dalam kajian ini akan dicoba dibahas bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam penggunaan produk dan jasa LKMS.

Kajian Teori

1. Konsep Dasar LKM

Dalam UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Bab I Pasal 1, diterangkan bahwa Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Pinjaman adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang

⁶ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Seri Edukasi Perbankan Syariah Produk dan Jasa Perbankan Syariah*. 2016. Hal, 6



harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan, sedangkan Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah.

Pasal 11 ayat (1) menerangkan bahwa kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha Skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Dilanjutkan dengan pasal 12 ayat (1) menerangkan bahwa Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan dan pengelolaan Simpanan oleh LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan setara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan UU tersebut jelas bahwa dalam operasional LKM terbagi menjadi dua, LKM yang berprinsip syariah dan konvensional.

Menurut *Asian Development Bank* (ADB), lembaga keuangan mikro (*microfinance*) adalah lembaga keuangan yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loans*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*payment services*) serta money transfer yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil (*insurance to poor and low-income households and their microenterprises*). Sedangkan bentuk LKM dapat berupa: (1) lembaga formal misalnya bank desa dan koperasi, (2) lembaga semiformal misal organisasi non pemerintah, dan (3) sumber-sumber informal misalnya pelepas uang.⁷

Berkenaan dengan bentuk-bentuk atau kategori LKM di Indonesia Bank Indonesia telah mengklasifikasikan, setidaknya-tidaknya terdapat dua (2) bentuk utama LKM di Indonesia ini, yakni LKM bank dan non Bank. LKM bank adalah BRI Unit Desa, BPR dan BKD (Badan Kredit Desa). Sedangkan yang berbentuk non bank adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam (USP), Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), *Baitul mal Wattamwil* (BMT), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Arisan, Pola Pembiayaan *Gramen*, Pola Pembiayaan ASA, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dan credit union. Dari semua bentuk atau kategori LKM yang ada, dapat beroperasi berdasarkan bunga maupun bagi hasil, atau LKM konvensional dan syariah. Keberadaan LKMS bertujuan untuk mewadahi bagi mereka yang ingin memenuhi prinsip syariah dalam transaksi keuangan, sehingga pengusaha kecil atau menengah yang belum dapat mengakses produk dan jasa Perbankan Syariah akibat persyaratan yang belum terpenuhi, dapat mengakses LKMS.

Salah satu model Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berhasil dan sudah banyak diadopsi oleh banyak negara di dunia adalah *Grameen Bank*. Model ini sudah dikenal secara luas sebagai salah satu lembaga keuangan mikro tersukses di dunia dalam mengurangi kemiskinan yang ada, dikarenakan cepatnya ekspansi dan jangkauan yang luas terhadap masyarakat miskin dengan dampak positif pada

⁷ www.ADB.co.id dalam Wijon, Wiloejo Wirjo. *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkret Memutus Mata Rantai Kemiskinan*. Jakarta: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan, Edisi Khusus. Desember 2005. Hal, 5



pendapatan, pekerjaan, konsumsi, tabungan dan aset dari pesertanya⁸. Di Indonesia lembaga keuangan syariah yang muncul pertama kali adalah Baitul Tanwil Teknosa di Bandung pada tahun 1984, dalam bentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)⁹. Kemudian di susul pendirian Koperasi Ridho Gusti pada tahun 1989 di Bandung.

2. Dasar Hukum LKM (LKMS)

Keberadaan serta perkembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) baik yang berprinsip syariah maupun konvensional, telah mendapatkan perhatian dari berbagai pihak termasuk pemerintah. Beberapa landasan hukum sebagai dasar legal formal telah dikeluarkan oleh pemerintah, baik berupa Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah. UU tentang LKM adalah UU No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, dalam UU tersebut diatur perihal LKM konvensional (berbasis bunga) maupun LKM Syariah (berbasis bagi hasil dan jual beli). Dalam UU tersebut terdapat 17 bab 42 pasal, yang membahas mulai dari pengertian dan perbedaan LKM dan LKMS, luas wilayah, pembinaan dan pengawasan, sampai dengan ketentuan pidana.

Selain UU, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP), salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2014 Tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro. Dimana PP tersebut merupakan penjabaran dari UU 1945 dan UU No. 1 Tahun 2013, khususnya peraturan yang terkait dengan Suku bunga pinjaman atau imbal hasil pembiayaan serta cakupan wilayah usaha LKM sesuai dengan skala dari LKM tersebut, mulai dari Kelurahan, Kecamatan sampai dengan Kabupaten. Selain UU dan PP, pemerintah atau lembaga pemerintahan terkait seperti Bank Indonesia juga kerap mengeluarkan SK atau Surat Edaran sebagai dasar hukum dari LKM pada umumnya, seperti Surat Edaran BI No. 32/36/Kep/Dir, tertanggal 12 Mei 1999 Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Kemudian peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) serta otoritas lainnya. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Mengengah RI juga kerap mengeluarkan Surat Keputusan serta Peraturan Menteri.

3. Stabilitas Sistem Keuangan

Sistem keuangan adalah suatu sistem yang terdiri atas lembaga-lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan ke masyarakat¹⁰. Lembaga keuangan yang ada di Indonesia dapat dibedakan menjadi lembaga keuangan bank dan non bank. Yang semua saling berkaitan satu sama lain. Dan lembaga-lembaga tersebut dapat menciptakan uang kartal dan uang giral, serta

⁸ Saleh, Yopi dan Hidayat, Yayat. *Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Mendukung Pengentasan Kemiskinan di Perdesaan*. MEDIAGRO: Volume. 7, No. 1, 2011. Hal, 66

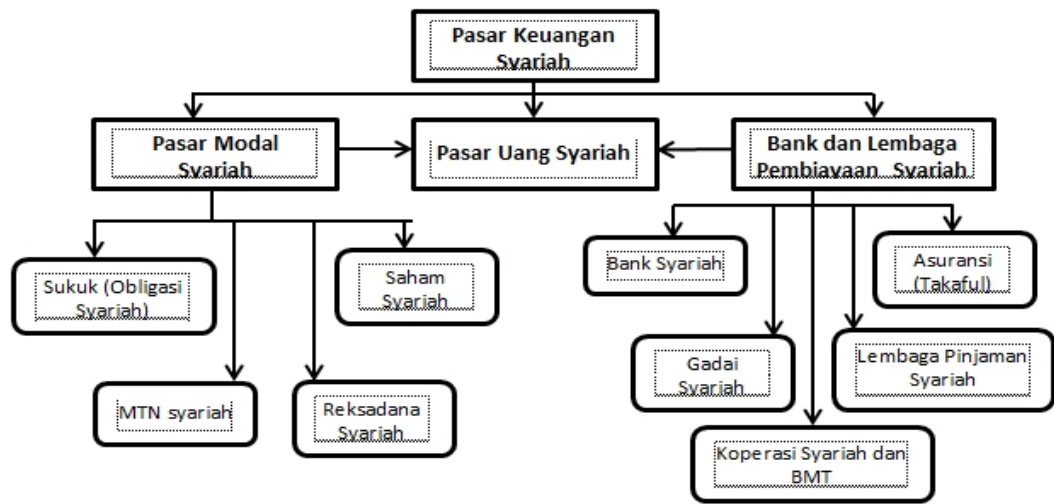
⁹ Bank Indonesia. 2016. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Departemen Riset Kebanksentralan Bank Indonesia. Hal, 21.

¹⁰ Aulia Pohan. 2008. *Potret Kebijakan Moneter Indonesi Seberapa Jauh Kebijakan Moneter Mewarnai Perekonomian Indonesia*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA. Hal, 78

aktivitas dari masing-masing lembaga keuangan akan berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan sistem moneter yang digunakan, di Indonesia menggunakan *dual financial system* yang artinya otoritas-otoritas moneter seperti Bank Indonesia dan OJK menyediakan perangkat atau instrumen bagi industri keuangan syariah. Lebih jauh pangsa pasar keuangan syariah dapat kita lihat dari gambar 2.1 berikut:

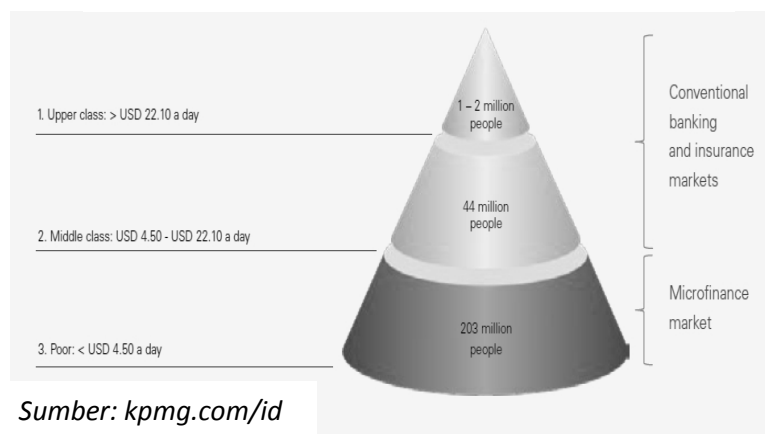
Gambar 2.1
Sistem Keuangan Syariah



Sumber: Bank Indonesia, 2016

Dari gambar 2.1 dapat kita lihat bahwa lembaga-lembaga keuangan syariah telah berkembang sedemikian rupa, mulai dari pasar modal syariah, pasar uang syariah dan bank dan lembaga pembiayaan syariah, bila kita cermati pada prinsipnya LKMS yang berada pada lembaga pembiayaan syariah juga menjadi bagian dari sistem keuangan nasional, yang artinya bahwa jika LKMS mengalami stabilitas keuangan terutama dalam sistem pembayarannya, secara langsung akan mempengaruhi kestabilan sistem keuangan syariah dan pada akhirnya juga akan berperan dalam menstabilkan sistem keuangan nasional. Bagaimana tidak, mengingat bahwa porsi atau komposisi pendapatan masyarakat Indonesia berada pada angka 203 juta penduduk berpenghasilan menengah kebawah, 44 juta berpenghasilan menengah (*middle class*) dan hanya 1-2 juta berpenghasilan tinggi (*Upper class*), sebagaimana gambar 2.2 berikut:

Gambar 2.2 Piramida Ekonomi Penduduk Indonesia



Masyarakat Indonesia pada umumnya belum dapat mengakses produk dan jasa dari perbankan, karena terkendala persyaratan bank. Oleh karena itu hendaknya upaya-upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan produk dan jasa LKMS harus selalu ditingkatkan oleh stakeholder keuangan syariah, baik regulator, praktisi maupun masyarakat itu sendiri. Untuk mendukung terciptanya sistem keuangan yang kuat dan sehat, sehingga mengarahkan perekonomian nasional pada pertumbuhan yang maksimal, berkualitas dan berkelanjutan (*sustainable*).

A. Data dan Metode Penelitian

Data yang digunakan dalam kajian ini bersumber dari beberapa publikasi institusi formal, yakni Badan Pusat Statistik (BPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Bank Indonesia (BI) serta sumber lain terkait. Sementara alat analisis yang dipakai bersifat deskriptif. Studi kepustakaan, baik yang bersumber dari buku teks, jurnal ilmiah atau laporan resmi dari Bank Indonesia serta *Forum Group Discussion* (FGD) dengan teman seprofesi maupun pelaku LKMS guna mempertajam analisis.

Hasil dan Pembahasan

1. Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penggunaan Produk dan Jasa LKMS

Potensi keuangan mikro syariah yang luar biasa di mana masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, di mana masyarakat kita semakin meningkat kesadaran akan pemenuhan prinsip syariah dalam setiap transaksi ekonomi dan keuangan serta keadaan di mana mayoritas penduduk Indonesia tidak dapat mengakses produk dan jasa dari perbankan syariah, maka optimalisasi peran dan fungsi LKMS sebagai motor penggerak keuangan mikro syariah, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan produk dan jasa LKMS, mutlak diupayakan. Beberapa pihak dan upaya yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:



a. Regulator (pemerintah)

Bank Indonesia selaku otoritas moneter, OJK selaku otoritas jasa keuangan dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) selaku penanggung jawab kepada perkembangan Koperasi dan UKM, secara langsung dan tidak langsung dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa LKMS, adapun strategi yang dapat dilakukan oleh regulator antara lain:

Pertama, Pembuatan dan sosialisasi dasar hukum terkait dengan lembaga keuangan syariah, khususnya LKMS. Sebagai regulator tentu BI, OJK dan Menteri Koperasi dan UKM dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah, Surat Edaran, Surat Keputusan dll, guna sebagai dasar hukum LKMS dalam menjalankan usahanya dan untuk memperlancar serta pengembangan usaha dalam bidang keuangan mikro, selain itu regulasi juga dapat dijadikan oleh praktisi dalam mengembangkan produk dan jasa LKMS. Selama ini para regulator memang sudah aktif menerbitkan dasar hukum sebagaimana yang disebutkan di atas, misalkan pada akhir tahun 2014 saja sudah banyak regulasi yang dikeluarkan.

In November 2014 the Indonesian Financial Services Authority issued 20 new and revised regulations. All of these regulations became effective on 1 January 2015¹¹.

Namun sekalipun sudah banyak regulasi yang diterbitkan oleh regulator, hanya saja sosialisasi kepada kalayak umum yang masih sangat kurang, hasilnya tidak banyak kalangan yang benar-benar mengetahui dan memahami regulasi-regulasi dari pemerintah, seperti UU, PP, Surat Edaran, Surat Keputusan dll, selama ini sosialisasi terbatas pada kalangan tertentu saja, seperti para akademisi lewat seminar, workhshop dan TOT (*Training Of Trainer*). Sehingga yang mengetahui dan memahami regulasi-regulasi yang dikeluarkan terhenti pada kalangan tertentu saja. Diperlukan sosialisasi yang lebih mendalam lagi agar lapisan masyarakat juga mengetahui dan memahi regulasi yang ada.

Kedua, Peningkatan Literasi LKMS kepada masyarakat luas. Upaya yang kedua yang dapat dilakukan oleh regulator (pemerintah) adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat akan eksistensi LKMS, mulai dari manfaat-manfaat yang dapat diakses di LKMS, produk dan jasa yang ada dan lain sebagainya. Bagaimana masyarakat akan berminat menggunakan produk dan jasa LKMS, jika tidak mengetahui secara mendalam tentang LKMS, karena persepsi masyarakat saat ini masih negatif terhadap lembaga keuangan syariah termasuk LKMS. Pada umumnya masyarakat masih berangapan bahwa lembaga keuangan syariah pada praktiknya tidak ada perbedaan dengan lembaga keuangan konvensional lainnya, dan berimbas pada pandangan terhadap LKMS. Oleh karena itu peningkatan literasi diperlukan salah satunya untuk menghilangkan citra buruk dari LKMS.

¹¹ New Indonesian 'Branchless Banking' and Microfinnce Laws-catalyst for Microfinance growth?. Kpmg.com



Ketiga, menerbitkan aturan secara khusus terkait dengan kemudahan akses LKMS. Pada dasarnya masyarakat memiliki pola pikir yang sederhana, di mana mereka mau menggunakan produk dan jasa lembaga keuangan termasuk LKMS, jika produk dan jasa tersebut dapat diakses dengan mudah, cepat dan menguntungkan. Salah satu kendala kenapa masyarakat enggan menggunakan LKMS karena dinilai, *margin rate* dari akad jual beli pada produk pembiayaan masih sangat tinggi. Menurut salah satu praktisi LKMS, bahwa rata-rata *margin rate* dari akad jual beli produk pembiayaan antara 18-20% per tahun untuk LKMS non bank. Tentu angka tersebut sangat memberatkan masyarakat (nasabah/anggota), oleh karena itu pengaturan tingkat imbal hasil atau margin harus ada patokan yang rasional dan dengan pertimbangan yang matang, agar LKMS dapat berkembang dan masyarakat tidak keberatan.

b. Praktisi (Pelaku LKMS)

Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh LKMS dalam mengembangkan usahanya (yang pada akhirnya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa LKMS), antara lain:

Pertama, menjalin dan meningkatkan kemitraan. Kemitraan akan meningkatkan kapasitas LKMS dalam menghadapi tantangan dan merebut peluang pasar keuangan mikro. Kemitraan dapat dilakukan dengan pemerintah dan otoritas, Perguruan Tinggi (lembaga penelitian), lembaga Keuangan Mikro lainnya dan pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Pengembangan kemitraan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam memperbaiki peluang bagi peningkatan kemampuan LKMS melalui transfer teknologi, keterampilan teknis dan manajemen, serta sumber daya lainnya¹². Dengan kerjasama atau kemitraan memungkinkan LKMS berkembang menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang lebih besar lagi.

Menjalinkan kemitraan dengan pemerintah, LKMS akan mendapatkan banyak manfaat salah satunya adalah pembinaan dari pemerintah, selain itu kemudahan-kemudahan dalam legalitas juga akan didapatkan, sehingga LKMS dapat mengembangkan pasarnya. Menjalinkan kemitraan dengan Perguruan Tinggi akan memudahkan LKMS dalam memanfaatkan hasil-hasil penelitian (terkait dengan LKMS) yang telah dilakukan lembaga penelitian dari Perguruan Tinggi, sehingga dari hasil riset tersebut LKMS dapat memahami strategi yang bagaimanapun yang sesuai dalam mengembangkan pasar keuangan mikro.

Kemitraan dengan LKMS lainnya akan menjadikan LKMS saling bertukar informasi dan data baik tentang pasar keuangan mikro, SDI (Sumber Daya *Insani*), Nasabah/anggota dan lain sebagainya, sehingga akan memudahkan LKMS dalam mendalami pasar keuangan mikro. Terakhir kemitraan dengan pelaku UMKM akan

¹² Imam Suhartono. *Strategi Pengembangan Koperasi Berorientasi Bisnis*. Among Makarti, Vol.4 No.7, Juli 2011. Sumber: jurnal.stieama.ac.id/index.php/ama/article/download/32/29. Hal, 44



secara langsung meningkatkan pangsa pasar dan partisipasi masyarakat dalam penggunaan produk dan jasa LKMS. Baik LKMS maupun pelaku UMKM akan saling mendapatkan manfaat, dari hasil kerjasama tersebut.

Kedua, mengembangkan produk dan Jasa LKMS sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan usaha masyarakat berjalan sangat dinamis, dan semua sedang mengarah pada bisnis yang memenuhi prinsip-prinsip syariah, lihat saja perkembangan wisata syariah, kuliner halal sampai masalah *life style* yakni kosmetik halal, kegiatan bisnis yang demikian dinamis tentu memerlukan produk dan jasa dari LKMS yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Baik untuk pelaku usaha maupun untuk individu, jika LKMS tidak dapat memenuhi kebutuhan transaksi keuangan sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat, tentu masyarakat akan menggunakan produk dan jasa lembaga keuangan lainnya. Namun yang perlu diperhatikan oleh LKMS adalah agar akad dan produk tidak melanggar hukum Islam yang ada, karena ini menjadi keunikan tersendiri bagi LKMS dari LKM konvensional.

Ketiga, ikut aktif dalam meningkatkan literasi lembaga keuangan syariah kepada masyarakat. Jika hanya pemerintah dan otoritas saja yang melakukan literasi kepada masyarakat, maka hasilnya kurang maksimal, karena jangkauan tidak sampai masyarakat kelas menengah kebawah. Oleh karena itu peran aktif dari LKMS dalam membantu pemerintah dan otoritas untuk meningkatkan literasi lembaga keuangan syariah sangat dibutuhkan, guna menjangkau masyarakat yang berada diluar jangkauan pemerintah dan otoritas.

c. Masyarakat

Upaya-upaya yang dilakukan oleh banyak pihak dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan produk dan jasa LKMS, tidak akan berhasil secara maksimal tanpa ada respon yang positif dari masyarakat itu sendiri. Selain itu masyarakat harus benar-benar jeli dan teliti melihat perbedaan antara LKM Konvensional dan LKM Syariah (LKMS). Masyarakat harus lebih objektif lagi dalam menilai eksistensi dari LKMS.

Pada prinsipnya masih banyak hal yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak (*Stake holder*) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan produk dan jasa LKMS, namun semua ada skala prioritas, hal yang mustahil ketika semua strategi dilakukan secara bersamaan, tentu ada strategi utama dan strategi pendukung, mana yang didahulukan dan mana yang dilakukan kemudian.

2. Keterkaitan Stabilitas Sistem Keuangan Dengan LKMS

Lembaga Keuangan baik bank dan non bank, kegiatan ekonomi dan sistem keuangan nasional adalah satu kesatuan yang saling berkaitan, jika salah satu mengalami kegagalan maka akan berdampak negatif. Satu contoh ketika sistem keuangan mengalami ketidakstabilan, maka akan berdampak pada pailit (gagal) lembaga keuangan, dan kegiatan ekonomi jadi lesu. Indonesia pernah mengalami hal tersebut, tahun 1998 ketika mata uang rupiah jatuh akibat jatuhnya bath Thailand, terjadi krisis moneter yang terjadi adalah banyak bank umum yang “jatuh sakit” yang



akhirnya pemerintah harus memberikan dana talangan, dan dampak selanjutnya adalah krisis ekonomi yang ditandai dengan lesunya perekonomian nasional¹³. Dan tentu kita masih ingat krisis keuangan global yang diakibatkan dari krisis keuangan di Amerika akibat kredit macet di sektor perumahan (menurut kabar pada umumnya).

Laporan Bank Indonesia dalam Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) menyebutkan Pada semester I 2016, penyelenggaraan sistem pembayaran sebagai salah satu infrastruktur sistem keuangan berjalan dengan aman, lancar dan efisien sehingga mampu mendukung terjaganya stabilitas moneter dan sistem keuangan, serta memperlancar kegiatan perekonomian.

Data berikut Gambar 4.1 dan 4.2 akan memberikan gambaran bahwa ada perkembangan yang dinamis dari pasar keuangan mikro, baik jumlah pelaku maupun jumlah aset, dari tahun ke tahun tumbuh secara positif, hal ini menggambarkan LKM pada umumnya memiliki andil dalam sistem keuangan nasional, selain memang karena LKM adalah bagian dari Lembaga Keuangan, porsi LKM dari segi Aset dan jumlah lembaga juga banyak.

Gambar 4. 1 Pertumbuhan Jumlah Pelaku LKM

Keterangan	Kuartal I Quarter I 2016	Kuartal II Quarter II 2016	Kuartal III Quarter III 2016	Items
Konvensional	46	74	115	Conventional
Koperasi	33	57	98	Cooperative
PT	13	17	17	Limited Company
Syariah	11	13	14	Sharia
Koperasi	11	13	14	Cooperative
PT	-	-	-	Limited Company
Total	57	87	129	Total

Sumber: Laporan OJK, 2016

Gambar 4. 2 Ikhtisar Data Keuangan LKM (Miliar Rupiah)

Keterangan	Kuartal I Quarter I 2016	Kuartal II Quarter II 2016	Kuartal III Quarter III 2016
Aset	32,84	219,34	258,47
Liabilitas	22,05	125,62	127,54
Ekuitas	5,55	57,10	81,63
Dana Syirkah Temporer	5,25	36,61	49,30
Penempatan Dana	10,88	34,47	61,98
Pinjaman Yang Diberikan	19,37	143,04	155,53
Simpanan/Tabungan	20,37	107,97	108,19
Pinjaman Yang Diterima	1,27	10,24	10,06

Pemerintah dan otoritas memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengawasi dan membina LKM, begitu juga dengan keberadaan LKMS yang berpotensi besar di mana pasar mikro syariah masih terbuka lebar, baik pemerintah maupun praktisi harus mampu mengambil peluang tersebut. sebagaimana data yang disampaikan di awal 203 juta berpenghasilan menengah ke bawah dan hanya mampu mengakses LKM, dan jika muslim menaati prinsip syariah, maka LKMS akan menjadi pilihannya sehingga LKMS harus siap dengan perkembangan pasar keuangan mikro syariah. Sektor

¹³ Ahmad Iskandar, 2011. *Obligasi Rekapitulasi Perbankan Orang Miskin Membiayai Orang Kaya*. Jakarta: Penerbit DIAN RAKYAT. Hal, 67



- Iskandar, Ahmad. *Obligasi Rekapitulasi Perbankan Orang Miskin Membiayai Orang Kaya*. Jakarta: Penerbit DIAN RAKYAT. 2011
- Karim, A. Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islam, Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Nachrowi, D Nachrowi dan Usman, Hardius. . *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2006
- Nurohman, dede. *Konsep Self Interest dan Masalah Dalam Rasionalitas Ekonomi Islam*. Islamica: Jurnal Studi Keislaman. Vol. 5, No. 1, September 2010
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Seri Edukasi Perbankan Syariah Produk dan Jasa Perbankan Syariah*. 2016
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Lembaga Keuangan Mikro Indonesia Laporan Kuartalan Indonesia Microfinance Institutions Statistics Quarterly Report 2016*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2014 Tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro. www.hukumonline.com
- Pohan, Aulia. 2008. *Potret Kebijakan Moneter Indonesi Seberapa Jauh Kebijakan Moneter Mewarnai Perekonomian Indonesia*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA
- Seibel, Hans Dieter. *Islamic Microfinance in Indoensia: The Chalenge of Institutional Diversity, Regulation and Supervision*. Financing the Poor: Toward an Islamic Micro-Finance A Symposium, 14 April 2007. Islamic Finance Project Islamic Legal Studies Program HARVARD LAW SCHOOL
- Solihin, et all. *Islamic Banking And The Economic Integration In Asean*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 19, Nomor 1, Juli 2016
- Suhartono, Imam. *Strategi Pengembangan Koperasi Berorientasi Bisnis*. Among Makarti, Vol.4 No.7, Juli 2011. Sumber: jurnal.stieama.ac.id/index.php/ama/article/download/32/29
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2012
- Sriyana, Jaka. 2010. *Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Studi Kasus di Kab. Bantul*. Simposium Nasional: Menuju Purworejo Dinamis dan Kreatif. (tidak dipublikasikan)
- Tanjung, H dan Devi, A. 2013. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. Sumber: www.hukumonline.com
- Venkatraman, &V.Ramanujam. 1986. *Measurement of Business Performance in Strategy Research: a Comparison of Approaches*. Academy of Management Review, Vol 11, pp801-814



Wijon, Wiloejo Wirjo. *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sstem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan*. Jakarta: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan, Edisi Khusus. Desember 2005.

